

memperkirakan ada sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut data EIA, cadangan sumber daya alam terbesar mungkin berasal dari gas alam yang diperkirakan sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan minyak Qatar. Selain itu, perairan kawasan China Selatan merupakan jalur pelayaran utama dan pusat habitat ikan sehingga banyak negara yang melewati kawasan tersebut sebagai jalur yang menguntungkan.

Hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif yakni adanya unjuk kekuatan dan pergerakan yang bersifat agresif serta provokatif. Faktanya, kecuali di awal sejarahnya, Laut Cina Selatan telah mengalami konflik terbuka sejak tahun 1970-an. Hal itu tercermin dari urutan penguasaan atau kewenangan di kawasan yang mempengaruhi perubahan nama kawasan perairan. Pada tahun 1974 terjadi bentrokan besar yang menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 bentrokan lain terjadi antara angkatan laut Tiongkok dan Vietnam di Pegunungan Spratly, di mana Vietnam kehilangan 70 tentara. Angkatan Laut Filipina juga mengalami ketegangan kecil dengan angkatan laut Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Konflik pecah antara

Angkatan Laut Filipina dan China di Beting Karang Scarborough. Demikian pula, ketegangan muncul antara angkatan laut Filipina dan Vietnam setelah kapal-kapal kedua negara terlibat dalam provokasi yang menciptakan ketegangan timbal balik (Nainggolan, 2003).

Menyadari adanya potensi konflik, maka dilakukan upaya pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa secara damai. Upaya pengembangan kerja sama keamanan kawasan, penyelesaian sengketa, serta pencegahan konflik di Laut Cina Selatan. Maka dari itu pentingnya upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan Negara dari segala tindakan yang mengancam di seluruh wilayah. Kedaulatan Negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas – luasnya baik ke dalam maupun ke luar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai

melakukan tugas-tugas militer dalam keadaan darurat, sementara sering tidak dianggap sebagai angkatan bersenjata tetapi sebagai aktor pelengkap (Gebhard, 2001).

Milisi Maritim China adalah cabang resmi angkatan bersenjata Republik Rakyat China. Milisi angkatan laut memiliki jumlah kapal yang sangat banyak dan memiliki pasukan elit yang bertugas menangani kondisi di wilayah sengketa Laut China Selatan. Milisi Angkatan Laut memiliki dua fungsi, pertama, untuk mendukung dan melindungi hak-hak Republik Rakyat China di masa damai. Kedua, mempersiapkan diri untuk berperang dan memenangkan perang selama perang (Gebhard, 2001).

Mereka menerima pelatihan dari Tentara Pembebasan China dan Penjaga Pantai China untuk melakukan tugas-tugas patroli perbatasan, pengawasan dan pengintaian, transportasi laut, pencarian dan penyelamatan, dan tugas-tugas tambahan dalam mendukung operasi angkatan laut di masa perang.

Milisi maritim China dibentuk sebelum partai komunis berkuasa, tetapi pada tahun 1950 an Partai komunis China sudah membentuk sistem yang membuat banyak milisi maritim yang didukung

negara keluar dari pesisir dan garis pantai. Hal tersebut didukung dengan beberapa kondisi diantaranya adalah dimulai dengan penggunaan kapal laut sipil oleh milisi maritim yang kemudian ada pembinaan milisi maritime bersama para nelayan agar pengalaman dibidang kepelautan meningkat. Kondisi tersebut mengubah milisi pertahanan di pesisir menjadi milisi maritime di laut yang memiliki spesialisasi, tanggap darurat, dan unit teknologi.

Salah satu tindakan China yang cukup rutin adalah latihan angkatan laut, atau patroli, yang memberi isyarat kepada kawasan bahwa mereka menunjukkan kekuatan militer mereka dengan cara yang memiliki implikasi signifikan bagi keamanan dan kebijakan strategis negara. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya kesepakatan tentang kepemilikan wilayah Laut China Selatan, seperti batas wilayah, kerja sama pemetaan sumber daya alamnya, dan kebijakan lain yang mempengaruhi wilayah tersebut.

Operasi zona abu-abu yang dilakukan oleh milisi maritime ini dirancang untuk menang tanpa pertempuran dengan mengepung musuh dengan gerombolan kapal penangkap ikan. Hal tersebut merupakan strategi China, untuk

akhirnya menemukan sendiri terikat pada kepekaan politik dalam menghadapi aktor sipil. Terlepas dari apakah milisi maritim memainkan peran tempur yang signifikan atau tidak, sejumlah sarjana hukum kini mempertanyakan status sebenarnya dari kehadirannya di wilayah sengketa, khususnya Laut China Selatan (Kennedy, 2018), dan menganggap penting untuk menentukan status milisi maritim untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan hukum internasional dan mengetahui ke mana harus mencari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perilaku milisi maritim.

Pernyataan pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim hampir seluruh kedaulatan perairan Laut China Selatan berdasarkan teori sembilan garis putus-putus. Sementara itu, konsep sembilan garis putus-putus terdiri dari sembilan titik imajiner yang mewakili klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Berdasarkan teori tersebut, China menyatakan bahwa posisi pulau-pulau di Laut China Selatan termasuk dalam wilayahnya. Hal ini membuat marah negara-negara di kawasan seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia karena mereka juga mengklaim sebagian

Laut China Selatan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka. Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik karena China juga menguasai perairan Natuna di Kabupaten Natuna karena klaimnya atas Nine-Dash Line yang termasuk dalam lautnya. . daerah mempertanyakan niat China untuk memasukkan Perairan Kabupaten Natunan sebagai kawasan laut (Pradana, 2017).

Stabilitas di Laut China Selatan telah menurun karena China berusaha untuk memiliterisasi beberapa wilayah yang dianggap sebagai bagian dari negara China, menurut peta sembilan garis yang dirilis oleh pemerintah China. Upaya militerisasi ini berarti bahwa konflik dapat meningkat menjadi konflik terbuka antara negara penggugat dan non-penggugat. Salah satu negara yang merasakan dampak militerisasi China di Laut China Selatan adalah Indonesia. Meski posisi Indonesia bukan merupakan status claimant, Indonesia berkepentingan agar salah satu wilayahnya, yaitu Atlantik Utara, juga diklaim pada peta sembilan garis putus-putus yang digambar oleh China sebagai bagian dari wilayah China.

Indonesia yang melakukan operasi pengamanan (Anngy, 2019). Rangkaian latihan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa militer Indonesia mampu menjaga kedaulatan maritim dari ancaman dan gangguan.

Salah satu Latihan yang pernah dilakukan adalah Angkasa Yudha 2016. Latihan Angkasa Yudha pertama kali digelar di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Namun, Presiden Joko Widodo memerintahkan kamp pelatihan dipindahkan ke Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau.

Hadirnya Presiden didalam latihan ini telah menunjukkan bagaimana latihan ini ditujukan untuk menunjukkan kesiapan Indonesia khususnya TNI dalam menghadapi segala bentuk ancaman di wilayah Indonesia khususnya Natuna yang seringkali dimasuki oleh pasukan paramiliter yang menyamar sebagai nelayan yang dikirim dari wilayah Laut China Selatan (Utama, 2021). Penyamaran tersebut dilakukan dalam rangka pencarian informasi dan upaya menilai kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman yang muncul. Latihan ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi segala macam ancaman,

termasuk kemungkinan eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan, yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas Indonesia yang merupakan wilayah Natuna dan dibutuhkan oleh Cina yakni *Nine Dash Line*. Dengan mengasimilasi trimatra angkatan bersenjata, yaitu angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut. TNI berencana menunjukkan bahwa seluruh jajaran TNI dapat berintegrasi dan bekerja dalam operasi mengamankan wilayah Indonesia sekaligus memanfaatkan alutsista yang telah dimodernisasi beberapa tahun terakhir.

Secara diplomatik, merespons pelanggaran yang terjadi pada Desember 2019 yang lalu, Kemenlu RI mengirimkan nota protes diplomatik secara resmi ke Pemerintah Tiongkok. Hanya saja respons Pemerintah Tiongkok kurang positif, alih-alih mengajukan permohonan maaf, Tiongkok bersikukuh atas klaim sembilan garis putus-putusnya. Persoalan mengenai Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok pada dasarnya sulit untuk dipertemukan. Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 yang menyatakan Laut Natuna Utara sebagai ZEE Indonesia, sedangkan Tiongkok berpijak pada klaim historis.

Kemaritiman dan segera mendaftarkan peta baru tersebut ke PBB, khususnya Organisasi Hidrografi Internasional (Suastha, 2017). Perubahan itu terjadi sebagai tanggapan atas beberapa bentrokan antara nelayan dan aparat keamanan Indonesia di perairan Natuna.

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini dilakukan agar wilayah perairan Laut China Selatan yang masuk wilayah keadulatan Indonesia memiliki kekuatan lebih dan menjadi identitas yang khas. Perubahan nama Laut China Selatan pada peta baru yang dirilis pemerintah Indonesia memicu protes dari pemerintah China. Pemerintah China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, mengatakan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk mengubah nama Laut China Selatan merupakan upaya yang tidak baik dan tidak sesuai dengan standar penamaan.

Namun, pemerintah Indonesia tidak megindahkan protes yang disampaikan oleh Pemerintah China atas perubahan nama wilayah laut tersebut karena penamaan wilayah laut merupakan hak dari negara kepulauan yang harus dihormati oleh negara lain. Selain itu, Indonesia telah diakui sebagai

negara kepulauan didalam UNCLOS 1982 yang menegaskan hak Indonesia untuk menentukan batas dan menamai wilayah lautnya dan penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah kekuasaan laut Indonesia yang sah secara hukum, dan bukan wilayah Laut China Selatan secara keseluruhan. Perubahan nama dilakukan untuk mempertegas kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di perairan utara Natuna. Sehingga dapat mencegah pihak asing seperti pasukan paramiliter yang menyamar menjadi nelayan untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal dengan menggunakan klaim peta nine dash line yang dibuat oleh China untuk melakukan aktivitas melanggar hukum yang dapat memicu konfrontasi dengan pihak keamanan Indonesia.

Secara umum, aksi Tiongkok di Laut Natuna Utara menjadi pemicu bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan konsolidasi internal mengenai mekanisme yang tepat dalam menegakkan kedaulatan di wilayah tersebut, suatu hal yang selama ini belum mendapatkan posisi prioritas.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia selama ini dalam mengelola Laut Natuna Utara bisa dikatakan belum optimal. Pengerahan

- Indonesia Terhadap Militerisasi China Dilaut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019", *Paradigma Polistaat*. Vol 2, No 2.
- Djalal, Hasjim "Dispute Settlement and Management Conflict in the South China Sea", <http://www.sr-indonesia.com/in-thejournal/view/dispute-settlement-and-conflict-management-inthe-south-china-sea>
- Gebhard, Julia (2001) 'Militias', *MPEPIL* 338, para. 1
- Jiachen, Dai dan Geng Yueting,(2015), "Research On Requirements And Measures In Civilian Vessel Mobilization For Maritime Rights Protection", *National Defense*, No 10, pp41-44.
- Jinming, Li dan Li Dexia,(2003), *The Dotted Line On The Chinese Map Of The South China Sea : A Note*, *Ocean Development And International Law* 34.
- Kennedy, Connor (2018)"The Struggle for Blue Territory: Chinese Maritime Militia Grey Zone Operations", *RUSI Journal*, Vol. 163, No. 5, p. 19; Kraska & Monti, Op. cit., p. 456; Andrew Erickson,(2016) "Countering China's Third Sea Force: Unmask Maritime Militia Before They're Used Again", *The National Interest*.
- Luo, Shuxian & Jonathan G.Panter, (2021)"China's Maritime Militia and fishing fleets A Primer for operational staffs and tactical leaders", *Military Review Army University Press*.
- Martin, Sieff, (2012)"Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam," *Asia Pacific Defense Forum*, 13 September 2012.
- Nainggolan, Poltak Partogi,(2003)" Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan", *P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika*
- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi, (2017) *Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna)* menurut Unclos 1982, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.
- Ras, Abdul Rivai .(2001), *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik* .Penerbit Abdi Persada

Siporennu Indonesia (APSIDO)

Risdhianto, Agung, (2014), "Pengaruh Tiongkok Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan Serta Dampaknya Terhadap Indonesia", Kajian Triwulan I I TA 2014, Seskoad.

Santoso, T. I. (2020). Aksi Agresivitas Tiongkok Pada ZEE Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 41, Maret 2020*, 36-37.

Suastha, R (2017). Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-%20229239/diprotes-china-ri-%20daftarkan-nama-laut-natuna-utara-%20ke-pbb>. Diakses pada 13 Mei 2023

Utama, Jokowi Saksikan Skenario Tempur Sukhoi dan F-16. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161006132642-20163705/jokowi-saksikan-skenario-tempur-sukhoi-dan-f-16> Diakses pada 13 Mei 2023.